RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2015-2019
(REVISI)

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 56 Ayat (1), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 56 ayat (2) BKKBN mempunyai fungsi antara lain a). perumusan kebijakan nasional; b). penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); c). pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d). penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; e). penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; dan f). pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan nasional, BKKBN mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap III periode tahun 2015-2019, dimana sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB telah ditetapkan. Sasaran RPJMN tersebut harus dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan strategi implementasinya melalui berbagai output, indikator, komponen dan sub komponen pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019.

Mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini, khususnya perubahan pendekatan dari *money follow function* menjadi *money follow program*, serta perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian pada Renstra BKKBN 2015-2019 yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 212/PER/B1/2015 tanggal 11 Juni 2015. Lebih lanjut dalam penyesuaiannya, BKKBN telah terlebih dahulu melakukan penyempurnaan pada *Strategy Map* BKKBN *wide* dan BSC *(Balanced Score Card)* BKKBN. BSC BKKBN merupakan salah satu alat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja di lingkungan BKKBN, sehingga diharapkan berbagai indikator kinerja yang tertuang di dalam Renstra dapat tercapai dengan optimal.

Revisi Renstra BKKBN 2015-2019 ini secara umum tidak merubah Sasaran Pembangunan dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) agar dapat

diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien, memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran, berkontribusi secara langsung terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawa Cita kelima), serta dapat selalu dipantau perkembangannya dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara *in-line* dari RPJMN, Renstra, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja), Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), sampai dengan Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Berkenaan dengan adanya ketentuan baru dalam pemprograman dan penganggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), maka revisi Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada ketiga pendekatan tersebut. Selanjutnya, terkait dengan perubahan kewenangan pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN juga harus melakukan beberapa penyesuaian pada Renstra.

Revisi Renstra BKKBN 2015-2019 ini telah melalui beberapa langkah penyempurnaan dengan melakukan beberapa penyesuaian dan penajaman pada sasaran, outcome/Output, kegiatan, IKK, Komponen dan Sub Komponen dengan melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan BKKBN. Selanjutnya dalam implementasinya melalui Renja, ADIK dan RKA-K/L ke depan, diharapkan seluruh Unit Kerja di lingkungan BKKBN dapat mengacu pada dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 hasil revisi ini.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran BKKBN, kami berharap agar seluruh target sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BKKBN 2015-2019 ini dapat tercapai sehingga akan menggambarkan suksesnya implementasi program KKBPK secara utuh dan menyeluruh di semua tingkatan wilayah.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Surya Chandra Surapaty

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
PERATURAN KEPALA BKKBN NOMOR 199 TAHUN 2016..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 1
1.2 Potensi dan permasalahan..... 4

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BKKBN 9
2.1 Visi 9
2.2 Misi 9
2.3 Tujuan BKKBN..... 10
2.4 Sasaran Strategis BKKBN 10

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN..... 11
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional..... 11
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN..... 12
3.3 Kerangka Regulasi 15
3.4 Kerangka Kelembagaan 18

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 21
4.1 Target Kinerja..... 21
4.2 Kerangka Pendanaan 24

BAB V PENUTUP 27

LAMPIRAN
Lampiran 1 : Matriks Rencana Strategis BKKBN
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi

PERATURAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 199 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Kementerian/Lembaga melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, perlu menyesuaikan kebijakan anggaran yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 -2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN, merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus di capai serta indikator *output*, indikator *outcome*, target capaian, pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pasal 2

Renstra BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tentang :

a. Visi;
b. Misi;
c. Tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
d. Sasaran Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
e. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional;
f. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
g. Kerangka Regulasi;
h. Kerangka Kelembagaan;
i. Target Kinerja; dan
j. Kerangka Pendanaan.

Pasal 3

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar sinkronisasi kebijakan dan integrasi antara kegiatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan program dan kegiatan pemangku kepentingan dan mitra kerja.

Pasal 5

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun sebagai pedoman setiap unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam:

a. penyusunan Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat nasional;
b. penyusunan Rencana Strategis Daerah yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang; dan

c. penyusunan Rencana Belanja Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Pasal 6

Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 disusun untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada umumnya dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada khususnya.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2016

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1441

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 199 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2015 - 2019

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kualitas generasi mendatang untuk mensukseskan pembangunan. Terdapat dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan. Pertama, bahwa penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek yang berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Kedua, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut “pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas”.

Sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Selanjutnya, terkait dengan integrasi penduduk dengan pembangunan diperlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan. Secara garis besar, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada, dimana penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subyek dan obyek

dalam pembangunan, dimana pembangunan dilaksanakan oleh penduduk dan untuk penduduk. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan, BKKBN harus dapat memperkuat pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB beserta penjabarannya ke dalam program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan berbagai kegiatan prioritasnya, baik dari sisi pengendalian kuantitas penduduk (perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan), maupun dari sisi peningkatan kualitasnya (melalui kontribusi terhadap upaya perwujudan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera).

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2016, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan program dan kegiatan prioritas pada rancangan Pembangunan Nasional. Posisi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di dalam RKP tahun 2017 berada pada lingkup Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan. BKKBN memiliki kontribusi pada Pembangunan Kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi” dengan dukungan dan kontribusi Kementerian, Lembaga serta Mitra Kerja terkait lainnya. Pada program prioritas “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi”, BKKBN harus fokus pada pelaksanaan 5 (lima) kegiatan prioritas RKP 2017, yaitu: 1) Pelayanan KB, 2) Advokasi dan KIE KKBPK, 3) Pembinaan Remaja, 4) Pembangunan Keluarga, dan 5) Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Kelima kegiatan prioritas tersebut juga harus menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan rancangan program dan kegiatan prioritas di dalam revisi Renstra BKKBN 2015-2019.

Beberapa aspek penting lainnya yang harus menjadi perhatian dalam perumusan arah kebijakan dan strategi melalui pengembangan indikator kinerja dan pengembangan kegiatan prioritas beserta aspek pembiayaannya, adalah;

- Perubahan pendekatan perencanaan yang semula bersifat *money follow function* diubah menjadi *money follow program*. Dalam hal ini bahwa dari sisi pembiayaan, tidak seluruh fungsi harus dibiayai secara merata, melainkan harus selektif dengan mempertimbangkan prioritas program dan kegiatannya. Kementerian/Lembaga (K/L) harus dapat memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan mengutamakan pembiayaan untuk program/kegiatan yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian target/sasaran dan memiliki manfaat yang secara langsung dapat diterima oleh masyarakat.

- Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial. Dalam konteks pendekatan holistik, Program KKBPK harus dapat dilaksanakan dengan mobilisasi seluruh potensi dan sumber daya, baik di lingkungan BKKBN maupun bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan dan Mitra Kerja di seluruh tingkatan wilayah. Pada pendekatan tematik, Program KKBPK akan difokuskan pada tema sesuai Sasaran Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada pendekatan terintegrasi, BKKBN mengembangkan keterpaduan dan sinergitas program dan kegiatan lintas sektor Program KKBPK baik dengan Pemangku Kepentingan maupun dengan Mitra Kerja di semua tingkatan wilayah. Selanjutnya terkait dengan pendekatan spasial, Program KKBPK akan lebih difokuskan pada wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan atau wilayah tertentu yang menjadi prioritas.
- Memperhatikan pendekatan penganggaran yang berbasis kinerja, terpadu (unified budgeting), serta mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dalam konteks penganggaran berbasis kinerja, secara umum pengeluaran anggaran harus dapat dikaitkan dengan hasil (output) dari kegiatan yang telah dibiayai. Terkait dengan penganggaran terpadu, BKKBN harus mampu mengintegrasikan perencanaan anggaran untuk seluruh jenis belanja guna mencapai hasil (output) kegiatan. Kemudian dari sisi KPJM, penetapan penganggaran berdasarkan kebijakan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran, atau dapat memperkirakan implikasi anggaran sesuai peta kerja (road map) dalam pengembangan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu, dalam pengembangan indikator kinerja dan kegiatan-kegiatan prioritas juga telah mempertimbangkan aspek pemantauan dan evaluasinya. Keterkaitan antara Sasaran dan Indikator RPJMN, Renstra, untuk kemudian secara tahunan dapat mengakomodir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L, serta penuangannya dalam berbagai kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) harus jelas dan dapat selalu dievaluasi perkembangannya. Dari sisi pemantauan kinerja, untuk memastikan setiap indikator telah diukur dan terdokumentasikan dengan baik, maka pada setiap awal tahun berjalan dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja antara Kepala BKKBN dan Unit Kerja Eselon I. Sedangkan untuk Unit Kerja Eselon II, baik pusat maupun provinsi, dilakukan penandatanganan kontrak kinerja antara Kepala BKKBN dengan seluruh Eselon II. Perjanjian kinerja dan kontrak kinerja tersebut, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang menjadi lingkup fungsi dan tugas BKKBN terhadap

masyarakat.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Beberapa perubahan lingkungan strategis, seperti perubahan dari sisi pendekatan perencanaan pembangunan nasional yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya, pengembangan program dan kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, serta adanya perkembangan peraturan perundangan, juga menjadi dasar potensi pengembangan/penyempurnaan arah kebijakan, strategi dan kegiatan prioritas pada Renstra BKKBN 2015-2019 ini.

Terkait dengan potensi pengembangan program/kegiatan yang mengadopsi kerangka program prioritas pada RKP 2017, BKKBN memiliki potensi untuk lebih berkontribusi pada Pembangunan Kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi”. Pengembangan yang dilakukan dapat dilakukan melalui perumusan berbagai kegiatan yang secara langsung terkait dengan 5 (lima) kegiatan prioritas: 1) Pelayanan KB, 2) Advokasi dan KIE KKBPK, 3) Pembinaan Remaja, 4) Pembangunan Keluarga, dan 5) Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Pengembangannya dapat dilakukan baik pada level komponen maupun pada level sub komponen untuk dituangkan di dalam Renstra BKKBN 2015-2019.

Lebih lanjut terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren telah dibagi menjadi 4 (empat) Sub Urusan yang telah diatur pembagian kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan pada Renstra BKKBN 2015-2019 ini juga harus dapat mengakomodir berbagai kegiatan prioritas yang mempertimbangkan sinergitas dari 4 (empat) Sub Urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Pengembangan detail pelaksanaan Sub Urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Perubahan lingkungan strategis yang juga harus mendapat perhatian dalam penajaman Program KKBPK di lini lapangan, diantaranya terkait otonomi daerah. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan rentang kendali manajemen pelayanan Program KKBPK antara Pemerintah dengan Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, diantaranya melalui:

1) Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penuangan program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2) Ketersediaan rancang bangun program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3) Penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksana Program KKBPK di lini lapangan.

Jika keempat hal tersebut dapat diintegrasikan dengan baik, maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan program KKBPK di lini lapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat Indonesia.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 Buku II (Bab II – Bidang Sosial budaya) yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain: (1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 56,7 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 57,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 57,9 persen. Sedangkan pada tahun 2015 sebesar 58,9 persen (Susenas 2015) ; (2) Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru; (3) Tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (4) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (5) Kualitas pelayanan KB (supply side) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan

dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan; (6) Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka sinkronisasi dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.

b. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap program KKBPK terutama yang terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran; (2) Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012), angka ini belum mengalami penurunan (stagnan) dari tahun 2002; (3) Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar provinsi, antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga; (4) Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan; serta (5) Peran tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider.

c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Hal sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja, antara lain: (1) Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen (SDKI 2007 dan SDKI 2012); (2) Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria); (3) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun); (4) Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan

masih tinggi; (5) Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.

d. Pembangunan keluarga melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain: (1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga Indonesia (Keluarga Pra Sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan Keluarga Sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen (Pendataan Keluarga, BKKBN 2012); (2) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (3) Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, Kelompok Kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA); dan (4) Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

e. Penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB memiliki beberapa permasalahan, antara lain: (1) Belum seluruh kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang Pengendalian Penduduk dan KB dimasukan dalam perencanaan daerah (Indikator pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam RPJMN dan Renstra BKKBN ke dalam RPJMD dan Renstrada Provinsi dan Kabupaten/Kota); (2) Koordinasi pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan program pembangunan lainnya masih lemah (antara lain; koordinasi dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Jamkesmas/Jamkesda, Jampersal, PNPM, dan SJSN Kesehatan), serta perlunya penguatan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang KKB lintas sektor (misal: Kegiatan Kampung KB).

f. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS, diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi pendudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan

evaluasi pembangunan Kependudukan dan KB. Data Sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB. Namun, data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dijabarkan di atas sesuai dengan 5 (lima) kegiatan prioritas yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017: 1) Pelayanan KB, 2) Advokasi dan KIE KKBPK, 3) Pembinaan Remaja, 4) Pembangunan Keluarga, dan 5) Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi. Sehingga upaya-upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut harus benar-benar dapat digambarkan di dalam perbaikan/revisi Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 ini.

Pengembangan cakupan penggarapan Program KKBPK diantaranya juga dapat dilakukan melalui Program Tematik dan Program/kegiatan Direktif Presiden. Terkait dengan program tematik, BKKBN dapat berkontribusi dari sisi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang secara umum dapat diintegrasikan dengan berbagai kegiatan dalam lingkup peningkatan kualitas Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE Program KKBPK, lingkup pembinaan Keluarga Balita dan Anak, pembinaan Ketahanan Remaja, lingkup peningkatan kesertaan ber-KB di wilayah dan sasaran khusus (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan/DTPK), lingkup penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KKBPK, serta lingkup pengelolaan Program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi. Selain itu, BKKBN juga berkontribusi pada program tematik peningkatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Dalam hal ini BKKBN dapat berkontribusi dalam pengembangan program kerjasama dan studi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang maju dalam Program KKBPK (misal: Pakistan, Iran, Mesir). Kegiatan dukungan KSST masuk dalam kegiatan Pengembangan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Potensi yang juga dapat dikembangkan oleh BKKBN melalui Program/kegiatan Direktif Presiden adalah “Kampung KB”. Kampung KB merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi Program KKBPK di lini lapangan serta dapat menjadi jembatan integrasi kegiatan antara BKKBN dengan lintas Kementerian/Lembaga dan lintas sektor (Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota).

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BKKBN

Berbagai tingkatan dalam penuangan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, baik pada level sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output), Indikator RPJMN, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), level komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada Visi dan Misi Pemerintah (Kabinet Kerja) periode 2015-2019. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah.

2.1 Visi Pembangunan 2015-2019

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2.2 Misi Pembangunan 2015-2019

Sebagaimana tertera dalam RPJMN 2015-2019, untuk mewujudkan Visi di atas adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, telah disusun strategi pembangunan nasional, diantaranya melalui norma pembangunan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktifitas dengan memberikan perhatian khusus pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini kemudian didukung dengan fokus pada 3 (tiga) Dimensi Pembangunan, yaitu: 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam hal ini BKKBN masuk di dalam Dimensi Pembangunan yang pertama “Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat”.

2.3 Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I - RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

2.4 Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Ke-5 (lima) Sasaran Strategis tersebut kemudian akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasi upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Buku I RPJMN 2015-2019 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko *drop-out* maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE).
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.
9. Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. **Peningkatan Akses dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas,** yang dilakukan melalui strategi:
   a. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama dalam sistem SJSN Kesehatan dengan menata fasilitas pelayanan KB (kemudahan akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah);
   b. Peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
   c. Peningkatan Jaminan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) – melalui pengadaan dan distribusi alokon (supply chain management);
   d. Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai;
   e. Peningkatan pelayanan akseptor KB, baik secara statis pada fasilitas kesehatan (Faskes) yang melayani KB, dan pelayanan KB secara *mobile* di wilayah sulit (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK);
   f. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
   g. Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi;
   h. Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan.
2. **Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK,** yang dilakukan melalui strategi:
   a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK yang sinergi, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
   b. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audiensi dan momentum) kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah;

c. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai media massa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan KIE melalui media lini bawah (below the line);
d. Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
e. Peningkatan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan Program KKBPK, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD, maupun dari PPKBD/Sub PPKBD ke masyarakat.

3. **Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja,** yang dilakukan melalui strategi:
   a. Peningkatan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara pusat dan daerah, tentang KIE dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja;
   b. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
   c. Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe);
   d. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak - anak remaja mereka.

4. **Peningkatan Pembangunan Keluarga,** yang dilakukan melalui strategi:
   a. Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
   a. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
   b. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan);

c. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

5. **Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi**, yang dilakukan melalui strategi:

a. Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar selaras dengan Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan);

b. Peningkatan koordinasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terutama pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

c. Penguatan Kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pemantauan pembentukan Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

d. Penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang - undangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

e. Koordinasi terpadu lintas sektor (lintas kementerian/lembaga) terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kegiatan Program KKBPK (misal: Kegiatan Kampung KB);

f. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (misal: melalui forum Musrenbangda dan Musrenbangnas);

g. Peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang akurat dan tepat waktu;

h. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi;

i. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi disusun dalam rangka mewujudkan arah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2015-2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, adalah terwujudnya konsistensi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan:

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas keluarga (keluarga berkualitas) sehingga tercipta rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera (NKKBS).
3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui: promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, kebijakan keluarga berencana, penyelenggaraan sistem informasi keluarga, pemantauan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

Fokus penetapan Kebijakan Nasional Perkembangan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diarahkan untuk:

a. Menjamin tercapainya penurunan TFR sesuai target yang ditetapkan;
b. Meningkatkan kualitas penduduk dengan memanfaatkan bonus demografi;
c. Memberdayakan penerapan fungsi-fungsi keluarga; dan
d. Memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga.

Pemerintah juga menetapkan program dan kegiatan penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan:

a. Perencanaan kependudukan;
b. Penyediaan parameter kependudukan;

c. Analisis dampak kependudukan;
d. Kerjasama pendidikan kependudukan; dan
e. Penanganan isu-isu kependudukan di daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Hal tersebut di atas dilaksanakan dengan cara memberikan pembinaan dan pemenuhan pelayanan kepada masyarakat melalui advokasi, KIE, serta penyediaan sarana dan prasarana Program KKBPK. Penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk melembagakan dan membudayakan NKKBS yang dilakukan melalui Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pembangunan keluarga yang diarahkan untuk:

a. Melembagakan dan membudayakan NKKBS;
b. Memberdayakan fungsi keluarga;
c. Memandirikan keluarga;
d. Memberdayakan kearifan lokal;
e. Meningkatkan kualitas seluruh siklus hidup;
f. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; dan
g. Memberdayakan peran serta masyarakat.

Kedudukan serta tugas dan fungsi Penyuluh KB (PKB/PLKB) tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana pengelolaan Penyuluh KB (PKB/PLKB) merupakan kewenangan pemerintah Pusat (dalam hal ini adalah BKKBN), dan pendayagunaannya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam implementasinya, selain harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, juga diperlukan pedoman spesifik yang lebih operasional, mulai dari penetapan standar kompetensi penyuluhan KB, penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Penyuluh KB sampai pada strategi dan prosedur pelaksanaannnya termasuk pembentukan asesor dan lembaga diklat terakreditasi di provinsi.

Standardisasi tenaga pelayanan KB bagi petugas medis berkaitan dengan prosedur, tata cara dan kewenangan teknis medis memerlukan regulasi dan kerjasama dengan sektor/institusi terkait, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, kerangka regulasi penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB selama lima tahun ke depan adalah:

1. Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dalam lampiran dinyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah dalam hal ini BKKBN meliputi:

a) Pengendalian Penduduk;
   - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
   - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional.

b) Keluarga Berencana (KB);
   - Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk.
   - Pengelolaan Tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
   - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional.
   - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga.
   - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB.

c) Keluarga Sejahtera;
   - Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
   - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

d) Standardisasi dan Sertifikasi meliputi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).

2. Penetapan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Keluarga Berencana sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
3. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dalam penerapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, seperangkat peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelembagaan pengendalian penduduk dan KB di daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta petunjuk teknis tentang nomenklatur, struktur dan tugas fungsi lembaga di daerah yang menangani Program KKBPK.
4. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Norma Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) program dan kegiatan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

5. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam perincian program dan kegiatan serta penganggaran di kabupaten/kota sebagai rujukan daerah dalam menerapkan struktur program dan kegiatan, indikator per kegiatan kependudukan dan KB sekaligus kode akun anggaran.
6. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga secara nasional dan di daerah.
7. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan standardisasi pelayanan KB kepada tenaga Pelayanan KB.
8. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan pengelolaan tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB.
9. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan sertifikasi tenaga penyuluh KB.
10. Penetapan peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dan kementerian terkait terutama dalam penerapan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Penyusunan regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran program KB di daerah, antara lain untuk mendukung pencapaian peserta KB Baru, pembinaan peserta KB aktif, kedudukan operasional penyuluh KB, penyaluran anggaran mekanisme operasional dan penggerakan KB, distribusi alokon dari kabupaten/kota ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta insentif bagi tenaga lapangan KB.

Rincian kerangka regulasi dapat dilihat pada Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ditetapkan bahwa Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang menangani penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota agar dapat sepenuhnya mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN 2015-2019. Selain itu, dengan adanya bentuk kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB maka akan memudahkan saat penyusunan Program, Indikator dan Kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB baik di dalam RPJMD, Renstrada, dan RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka

perlu dilakukan penguatan fasilitasi, sosialisasi, pendampingan dan pembinaan, terutama dalam menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB diperlukan beberapa langkah kegiatan, diantaranya:

1. Penguatan kapasitas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, minimal berkaitan dengan;
   a) Penguatan kapasitas yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi, klasifikasi lembaga daerah yang menangani pengendalian penduduk dan KB.
   b) Penguatan kapasitas infrastruktur regulasi yang mendukung operasional maupun eksistensi lembaga sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan (peraturan daerah, peraturan Bupati/Walikota atau regulasi lain) yang berfungsi menjaga kualitas dan sinergitas kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program.
   c) Penguatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia baik tenaga pengelola Program, tenaga pelaksana maupun tenaga masyarakat yang menyelenggarakan Program KKBPK sesuai tingkatan wilayah.
   d) Penguatan program dan penuangan kegiatan sebagai tindak lanjut penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) program KKBPK sebagai penetapan arah Kebijakan umum pembangunan di daerah, Renstrada dan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD pembangunan pengendalian penduduk dan KB.
   e) Penguatan kapasitas dukungan sarana, prasarana dan anggaran untuk menyelenggarakan program KKBPK di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberlangsungan pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan sistem informasi keluarga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendataan Keluarga, pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan program KKBPK secara akurat dan tepat waktu.
3. Memperkuat kedudukan dan peran penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB terutama berkaitan dengan pengelolaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga non ASN yang didayagunakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaksanaan sertifikasi penyuluh KB;

4. Memperkuat kedudukan hukum PPKBD, SUB PPKBD dan kader KB sebagai penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam Pasal 150 dinyatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat khususnya yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, berperan serta aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan melakukan pelayanan Program KKBPK secara langsung kepada masyarakat.
5. Memperkuat pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian pelayanan/pembinaan kesertaan ber-KB serta dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6. Memperkuat pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) 2015-2019, maka BKKBN menyusun Renstra 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra BKKBN 2015-2019 mengacu pada sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output) dan indikator-indikator yang telah tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian pengembangan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen juga harus mempertimbangkan upaya perwujudan tujuan BKKBN untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”. Selain itu, dalam penyempurnaan Renstra ini, BKKBN juga memperhatikan berbagai prioritas pembangunan yang telah dirumuskan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017.

4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

4.1.2 Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (Outcome) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019. BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sehingga hanya mempunyai 1 (satu) Program Teknis yaitu Program Kependududukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta 3 (tiga) Program Generik yaitu: 1) Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN; 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; 3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

1. **Sasaran Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)**

   Sasaran Program (Outcome) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah Terlaksananya Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

   - Jumlah peserta KB baru /PB (juta)
   - ASFR 15-19 Tahun
   - Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern
   - Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga
   - Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana
   - Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan
   - Jumlah ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu

2. **Sasaran Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN**

   Sasaran Program (Outcome) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN sebagai berikut:

   - Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional
   - Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi
   - Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK
   - Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan
   - Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi

3. **Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN**

   Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebagai berikut:

   - Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB
   - Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK
   - Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja
   - Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)
   - Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
   - Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi

4. **Sasaran Program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN**

   Sasaran Program (Outcome) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN sebagai berikut:

   - Persentase Temuan Penyimpangan Strategis dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit
   - Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi

4.1.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program. Sasaran kegiatan merupakan keluaran yang harus dihasilkan oleh unit kerja Eselon II dengan alat ukur tingkat keberhasilan pencapaiannya menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk masing-masing unit kerja Eselon II telah disusun untuk seluruh Program dan Bidang di lingkungan BKKBN (tertera pada matrik lampiran Renstra ini).

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), Pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Dokumen penyusunan anggaran yang dibutuhkan sebelum APBN ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR, adalah RKA/KL dan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN). RKA-K/L merupakan dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan RDP BUN adalah rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 juga mengatur bahwa penyusunan RKA-K/L harus menggunakan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), penganggaran terpadu (unified budgeting) dan penganggaran berbasis kinerja (PBK).

4.2.1. Pendanaan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan sasaran yang harus dapat dicapai oleh BKKBN melalui integrasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan prioritas di seluruh Program, Bidang (Unit Eselon I) dan seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan BKKBN. Sehingga kerangka pendanaan Sasaran Strategis merupakan alokasi anggaran BKKBN secara keseluruhan (total anggaran BKKBN).

4.2.2. Pendanaan Program dan Indikator Kinerja Program

Kerangka pendanaan Program di lingkungan BKKBN dibagi pada 4 (empat) Program yang terdiri dari:

Tabel 4.2
Rancangan Kerangka Pendanaan Program BKKBN Tahun 2015-2019

PROGRAM		BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI ANGGARAN					2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	1.764.062,8	2.408.065,1	1.965.398,3	2.328.227,3	2.444.448,6	2.566.671,0	11.712.810,4
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN	566.318,8	636.340,6	616.155,3	768.753,3	2.907.190,9	3.052.550,5	7.980.990,6
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	5.369,9	11.629,0	12.460,9	17.600,0	18.480,0	19.404,0	79.573,9
4	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	204.115,1	265.188,4	191.293,8	296.011,1	310.811,7	326.352,2	1.389.657,2
TOTAL		**2.539.866,6**	**3.321.223,1**	**2.785.308,4**	**3.410.591,7**	**5.680.931,2**	**5.964.977,8**	**21.163.032,2**

4.2.3. Pendanaan Bidang dan Kegiatan

Di dalam rancangan kerangka pendanaan Program, terdapat pendanaan untuk level Bidang (unit Eselon I) dan level Kegiatan (unit kerja Eselon II). Di dalam Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terdapat 4 (empat) Bidang: Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) dan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN). Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DKM) terdapat 1 (satu) Bidang Sekretariat Utama (Sestama), pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur terdapat 1 (satu) Bidang Inspektorat Utama (Irtama), dan pada Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional terdapat 1 (satu) Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Latbang).

Pada masing-masing Bidang tersebut kemudian telah dijabarkan pada level kegiatan (unit kerja Eselon II), termasuk kerangka struktur kegiatan untuk unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi. Pendanaan pada level kegiatan merupakan anggaran untuk mendukung keluaran (output) yang dihasilkan oleh unit kerja Eselon II yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Program dan Bidang diatasnya. Rincian kerangka pendanaan per-Bidang (unit Eselon I) dan per-Kegiatan Prioritas (unit kerja Eselon II) telah tertera pada matrik lampiran Renstra ini.

BAB V
PENUTUP

Upaya penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang tergambar pada kondisi pencapaian Program KKBPK secara nasional selama lima tahun terakhir dimana target/sasaran yang telah ditetapkan belum berhasil dicapai secara maksimal. BKKBN harus lebih meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan prioritas baik secara internal di dalam lingkungan BKKBN sendiri, maupun dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor (lintas K/L) serta bersama mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah.

Perbaikan telah dilakukan di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 ini dengan telah mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan lingkungan strategis serta kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya; 1) Perubahan pendekatan yang semula *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, 2) Pendekatan Perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, dan 3) Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam RKP 2017.

Selain itu, penyempurnaan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Komponen dan Sub Komponen pada Renstra ini juga telah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan dan penajaman pada *Balanced Score Card* (BSC) BKKBN 2017-2019 yang akan menjadi salah satu alat ukur atau alat pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perbaikan/revisi pada Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas implementasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diseluruh tingkatan wilayah, dapat memperkuat strategi pelaksanaan kegiatan prioritas dalam pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan, serta dapat memudahkan proses evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja/ outcome dan output BKKBN. Berbagai permasalahan yang kemudian muncul dalam proses pelaksanaan Program dan Kegiatan BKKBN ke depan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang dapat dikembangkan.

Lampiran I:

Matriks Rencana Strategis (Renstra) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA 2015	TARGET KINERJA 2016	TARGET KINERJA 2017	TARGET KINERJA 2018	TARGET KINERJA 2019	2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH) 2015	ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2016	ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2017	ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2018	ALOKASI (JUTA RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2019	TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	TERCAPAINYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG									*2,539,866.6*	*3,321,223.1*	*2,785,308.5*	*3,410,591.7*	*5,680,931.2*	*5,964,977.8*	*21,163,032.3*	BKKBN	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	
			1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.60	2.37	2.36	2.33	2.31	2.28	2.28										
			2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	57.9	60.5	60.7	60.9	61.1	61.3	61.3										
			3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4 (8,6)	10.60	10.48	10,26	10,14	9,91	9,91										
			4 Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18.3	20.50	21.19	21.70	22.30	23.50	23.50										
			5 Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27.1	26.0	25.7	25.3	25.0	24.6	24.6										
I	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah									1,764,062.8	2,408,065.1	1,949,995.3	2,328,227.3	2,444,448.6	2,566,671.0	11,697,407.4	BKKBN	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	
			1 Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7.6	6.84	7.15	7.43	7.39	7.33	7.33										
			2 ASFR 15-19 Tahun	48 per 1000 perempuan 15-19 tahun	46 per 1000 perempuan 15-19 tahun	44 per 1000 perempuan 15-19 tahun	42 per 1000 perempuan 15-19 tahun	40 per 1000 perempuan 15-19 tahun	38 per 1000 perempuan 15-19 tahun	38 per 1000 perempuan 15-19 tahun										
			3 Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	11 (Survey RPJMN 2013)	16	21	31	50	70	70										
			4 Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	5 (Survey RPJMN 2013)	10	20	30	40	50	50										
			5 Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	48,4 (skala 0-100) *Survey RPJMN 2014)	48.4	49	50	51	52	52										
			6 Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	34	38	42	46	48	50	50										
			7 Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1	1	1	1	1	1	1										
A	Bidang Pengendalian Penduduk	Terimplementasikannya Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Perencanaan Pembangunan									16,187.6	32,246.5	15,962.2	17,640.0	18,626.0	19,557.2	104,031.9	BKKBN	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK (DALDUK)	
			A.1 Jumlah Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	-	34 provinsi; 50 Kab/Kota (9% dari 514 Kab/Kota); 20% K/L	34 provinsi; 110 Kab/Kota (20,1% dari 514 Kab/Kota); 25% K/L	34 provinsi; 170 Kab/Kota (31% dari 514 Kab/Kota); 30% K/L	34 provinsi; 240 Kab/Kota (43% dari 514 Kab/Kota); 35% K/L	34 provinsi; 300 Kab/Kota (54% dari 514 Kab/Kota); 40% K/L	34 provinsi; 300 Kab/Kota (54% dari 514 Kab/Kota); 40% K/L										
1	Perencanaan Pengendalian Penduduk	Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan									4,321.7	14,015.5	4,254.1	4,500.0	4,620.0	4,851.0	32,240.6	PUSAT	DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DITRENDUK)	B Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			I.1 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan	8 (sektor)	8 (sektor)	10 (sektor)	12 (sektor)	14 (sektor)	16 (sektor)	16 (sektor)										
			1.1 Persentase pemerintah Provinsi dan kab/kota yang menyediakan profil (parameter dan proyeksi) penduduk dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah	Prov 50%	Prov 50% Kab/kota 10%	Prov 100% Kab/kota 15%	Prov 100% Kab/kota 20%	Prov 100% Kab/kota 40%	Prov 100% Kab/kota 60%	Prov 100% Kab/kota 60%										
			051 Pengembangan kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk																	
			052 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk																	
			053 Pemanfaatan data sasaran pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan																	
			054 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk																	
			1.2 Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian Penduduk	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov										
			055 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Perencanaan Pengendalian Penduduk																	
2	Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota									3,844.5	5,405.9	3,828.2	4,010.0	3,947.0	4,144.3	21,335.4	PUSAT	DIREKTORAT PEMADUAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENDUDUK (DITJAKDUK)	N Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			I.2 Persentase Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	20% sektor; 10% provinsi; 5% Kab/Kota	30% sektor; 15% provinsi; 10% Kab/Kota	35% sektor; 20% provinsi; 15% Kab/Kota	40% sektor; 25% provinsi; 20% Kab/Kota	45% sektor; 30% provinsi; 25% Kab/Kota	50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota	50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota										
			2.1 Persentase kabupaten/kota yang memiliki grand desain pembangunan kependudukan	-	40% kab/kota	60% kab/kota	80% kab/kota	90% kab/kota	100% kab/kota	100% kab/kota										
			061 Kebijakan dan strategi grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota																	
			062 Fasilitasi penyusunan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota																	
			063 Implementasi/pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan tingkat kabupaten/kota																	
			064 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk kementerian/lembaga dengan kebijakan pembangunan daerah																	
			2.2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	33 provinsi	33 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi										
			065 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk																	
3	Kerjasama Pendidikan Kependudukan	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pendidikan kependudukan antar lembaga pendidikan									3,860.4	5,539.0	3,609.4	4,400.0	4,620.0	4,851.0	23,019.4	PUSAT	DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN (DITPENDUK)	B Prioritas RKP (Penguatan Advokasi dan KIE KB)
			I.3 Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
			3.1 Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
			071 Kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan																	
			072 Penyiapan materi pendidikan kependudukan																	
			073 Peningkatan dan atau pengembangan kemitraan pendidikan kependudukan																	
			074 Implementasi pendidikan kependudukan (desiminasi/publikasi)																	
			3.2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan	33	33	34	34	34	34	34										
			075 Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
					2015	2016	2017	2018	2019			2015	PRAKIRAAN MAJU							
													2016	2017	2018	2019				
4	Analisis Dampak Kependudukan	Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis									4,161.0	7,286.1	4,270.5	4,730.0	5,439.0	5,711.0	27,436.6	PUSAT	DIREKTORAT ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN (DITDAMDUK)	B Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			I.4 Jumlah kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah	-	4	6	6	6	6	28										
			4.1 Jumlah kabupaten/kota/sektor yang menginternalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan ke dalam perencanaan program dan kegiatan	-	4 Provinsi	6 Provinsi	10 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	10 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	14 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	34 Provinsi, 330 Kab/Kota, 18 Sektor										
			081 Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Program Pengendalian Dampak Kependudukan (berbasis sektoral, tematik dan spasial)																	
			082 Penguatan Kemitraan dan Pelembagaan kebijakan Dampak kependudukan																	
			083 Intervensi Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan																	
			4.2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian dampak kependudukan	-	4 Provinsi	6 Provinsi	10 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	10 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	13 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	33 Provinsi, 330 Kab/Kota, 18 Sektor										
			084 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak kependudukan																	
B	Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan KB dan KR									515,370.1	901,717.8	1,056,602.2	578,510.4	894,083.6	938,787.8	4,369,701.9	BKKBN	DEPUTI BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI (KBKR)	
			B.1 Jumlah PA Tambahan	-	-	-	1,150,000	965,000	744,000	2,859,000										
			B.2 Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)	122 Kabupaten	12%	24%	36%	48%	60%	60%										
5	Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah									496,071.3	863,697.7	1,040,857.5	561,753.5	877,801.2	921,691.3	4,265,801.3	PUSAT	DIREKTORAT BINA KESERTAAN BER-KB JALUR PEMERINTAH (DITJALPEM)	N Prioritas RKP (Peningkatan Pelayanan KB)
			I.5 Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan	53	53	53.5	54	54.5	55	55										
			5.1 Persentase Faskes Jalur Pemerintah yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang Memenuhi Standar Pelayanan KB (15.798 faskes pemerintah)	26.7%	26.7%	45.0%	63.4%	81.7%	100%	100%										
			091 Penguatan Kebijakan dan Strategi Operasional Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Pemerintah yang Terintegrasi dengan BPJS Kesehatan																	
			092 Penguatan Penggerakan dan Pelayanan KB																	
			093 Peningkatan akses dan kualitas Pelayanan KB di Faskes Pemerintah																	
			II.5 Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019)	24,8% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN kesehatan/53.342)	29.4%	43.3%	57.2%	71.1%	85%	85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019)											
			5.2 Persentase Faskes yang Mendapat Sarana Pelayanan KB (Jumlah faskes pemerintah dan swasta yang terpenuhi sarananya dibandingkan dengan target faskes yang harus dipenuhi sarananya pada 2019 = 45.340 faskes)	46.6%	46.6%	59.9%	73.3%	86.6%	100%	100% (dari total asumsi faskes teregister dalam SIM BKKBN)										
			094 Jaminan Ketersediaan Alokon																	
			095 Pemenuhan Sarana Pelayanan KB																	
			III.5 Jumlah fasilitasi pembinaan kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	12 kali di setiap provinsi	12 kali di setiap provinsi	12 kali di setiap provinsi	12 kali di setiap provinsi	12 kali di setiap provinsi	12 kali di setiap provinsi	12 kali di setiap provinsi										
			5.3 Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi KB Jalur Pemerintah yang berkualitas	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi										
			096 Penguatan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah																	
			097 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kesertaan KB Jalur Pemerintah																	
6	Pembinaan standarisasi kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi									5,057.0	15,797.3	6,337.0	6,857.0	6,989.9	7,339.3	43,320.4	PUSAT	DIREKTORAT BINA KESERTAAN BER-KB JALUR SWASTA (DITJALSWA)	N Prioritas RKP (Peningkatan Pelayanan KB)
			I.6 Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)	8% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/ 53.342)	8%	27%	47%	66%	85%	85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342 = 45.340 Faskes di 2019)											
			6.1 Persentase Faskes swasta yang terakreditasi/rekognisi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan KB	-	-	-	20%	30%	50%	50 % dari total Faskes Swasta yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2016										
			101 Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pelayanan KB Jalur Swasta																	
			102 Peningkatan Kapasitas SDM, serta ketersediaan Alokon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Berkualitas di Faskes Swasta dan Jejaringnya																	
			103 Peningkatan Peran Serta Mitra Kerja dalam Pelayanan KB Jalur Swasta																	
			II.6 Persentase Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	58,9% (MS 2014)	60%	61.5%	63%	64.5%	66%	66%										
			6.2 Persentase terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi KB Jalur Swasta yang berkualitas	34 provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	34 provinsi terfasilitasi pembinaan KB Jalur Swasta										
			104 Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
					2015	2016	2017	2018	2019			2015	PRAKIRAAN MAJU 2016	2017	2018	2019				
7	Peningkatan Kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus									10,574.8	15,125.8	5,695.3	4,981.0	4,620.0	4,851.0	35,273.1	PUSAT	DIREKTORAT BINA KESERTAAN BER-KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS (DITJALSUS)	N Prioritas RKP (Peningkatan Pelayanan KB)
			I.7 *Persentase kabupaten (Kabupaten Galciltas) dan kota (Wilayah Miskin Perkotaan) yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB*	183 Kabupaten galciltas dan 97 Wilayah Kota	12% Kab Galciltas dan 25% Wilayah Kota	24% Kab Galciltas dan 35% Wilayah kota	36% Kab Galciltas dan 45% Wilayah Kota	48% Kab Galciltas dan 55% Wilayah Kota	60% Kab Galciltas dan 65% Wilayah Kota	60% Kab Galciltas dan 65% Wilayah Kota									
			7.1 Persentase Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) dan wilayah miskin perkotaan yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB	122 Kabupaten dan 97 Kota (Perpres 131/2015)	12% Kab dan 25% Kota	24% Kab dan 35% Kota	36% Kab dan 45% Kota	48% Kab dan 55% Kota	60% Kab dan 65% Kota	60% Kab dan 65% Kota									
			110 Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin, DTPK dan sasaran khusus (KB Pria)																	
			111 Fasilitasi Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan DTPK																	
			112 Peningkatan Peran Mitra Kerja dalam Pembinaan Pelayanan ber-KB bagi Penduduk Miskin dan Daerah Tertinggal (termasuk DTPK)																	
			113 Fasilitasi Pelaksanaan Pembinaan Pelayanan KB Pria																	
			7.2 Jumlah fasilitasi pembinaan KBKR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria)	33 Provinsi	33 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi									
			114 Pembinaan, Monitoring, Evaluasi di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria)																	
8	Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi									3,667.0	7,097.1	3,712.4	4,918.9	4,672.5	4,906.1	25,307.1	PUSAT	DIREKTORAT KESEHATAN REPRODUKSI (DITKESPRO)	N Prioritas RKP (Peningkatan Pelayanan KB)
			I.8 Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas	8% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama	8% dari 53.342 faskes	27% dari 53.342 faskes	47% dari 53.342 faskes	66% dari 53.342 faskes	85% dari 53.342 faskes	85% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN									
			8.1 Persentase Faskes yang memberikan informasi Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi	8% dari 53.342 faskes	8% dari 53.342 faskes	27% dari 53.342 faskes	47% dari 53.342 faskes	66% dari 53.342 faskes	85% dari 53.342 faskes	85% dari 53.342 faskes									
			121 Penyediaan Kebijakan, Strategi dan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi yang Dikembangkan																	
			122 Penyediaan Sarana dan distribusi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan																	
			123 Penguatan Peran Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Faskes																	
			124 Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi di DTPK																	
			125 Peningkatan Kesertaan KB PP &PK																	
			II.8 Persentase Kelompok Sasaran (poktan/BKB-BKRBKL-UPPKS dan PPKS) yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas (memenuhi standar)	-	5% dari 265.045 poktan	10% dari 265.045 poktan	15% dari 265.045 poktan	20% dari 265.045 poktan	25% dari 265.045 poktan	25% dari 265.045 poktan									
			8.1 Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi	-	5% dari 265.045 poktan	10% dari 265.045 poktan	15% dari 265.045 poktan	20% dari 265.045 poktan	25% dari 265.045 poktan	25% dari 265.045 poktan									
			126 Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi (di komunitas, mitra kerja, serta bagi PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD)																	
			127 Penyediaan Sarana Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Kelompok kegiatan																	
			8.2 Jumlah fasilitasi pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	33	33	34	34	34	34	34									
			128 Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi																	
C	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Meningkatnya Ketahanan Keluarga guna mewujudkan Keluarga Berkualitas									18,696.7	52,395.5	20,040.7	102,160.2	24,475.7	25,699.5	224,771.5	BKKBN	DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (KSPK)	
			C.1 Persentase Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)	-	17.0%	16,5%	16.0%	15,5%	15.0%	15.0%										
			C.2 Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama	9,5% (SDKI 2012)	9.45%	9.25%	9.20%	9.10%	9.00%	9.00%										
			C.4 Median Usia Kawin Pertama Perempuan	20.1	20,6	20,7	20,8	20,9	21	21										
9	Pembinaan Keluarga Balita dan Anak	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak									5,734.4	20,780.8	5,654.1	4,985.2	5,129.5	5,385.9	41,935.5	PUSAT	DIREKTORAT BINA KELUARGA BALITA DAN ANAK (DITBALNAK)	N Prioritas RKP (Pembangunan keluarga)
			I.9 Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	45.2%	50.2%	55.5%	60.5%	65.5%	70.5%	70.5%									
			9.1 Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	45.2%	50.2%	55.5%	60.5%	65.5%	70.5%	70.5%									
			131 Promosi Pembinaan Keluarga BKB																	
			132 Penguatan Jejaring Kemitraan BKB																	
			II.9 Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	80% Data Dallap Okt 2014	80%	80%	80%	80%	80%	80%									
			9.2 Persentase Kelompok BKB HI yang mendapat pembinaan KKBPK	-	7,5%	10%	12,5%	15%	17,5%	17,5%									
			133 Peningkatan Kualitas pembinaan kelompok BKB HI																	
			9.3 Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita yang berkualitas	-	34	34	34	34	34	34									
			134 Monitoring dan Evaluasi Program Bina Keluarga Balita																	
10	Pembinaan Ketahanan Remaja	Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)									5,238.6	12,186.3	6,052.4	83,647.5	5,562.4	5,840.5	113,289.0	PUSAT	DIREKTORAT BINA KETAHANAN REMAJA (DITHANREM)	N Prioritas RKP (Pembinaan Remaja)
			I.10 Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe)	48,4 (rentang indeks 0-100) *Survey RPJMN 2014)	48.4	49	50	51	52	52									
			10.1 Indeks pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi	-	48.4	49	50	51	52	52									
			141 Penyusunan Kebijakan, strategi, pedoman, materi dan Administrasi																	
			142 Penguatan Promosi dan pelembagaan Program GenRe																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
												2015	PRAKIRAAN MAJU							
					2015	2016	2017	2018	2019				2016	2017	2018	2019				
			II.10 Persentase PUS anggota BKR yang ber KB	74% dari PUS pada 2,06jt keluarga yang menjadi anggota BKR (Stat Rutin 2013)	74.0%	74.5%	75.0%	75,5%	76.0%	76.0%										
			10.2 Persentase remaja yang mengakses PIK (dari yang pernah mendengar tentang PIK)	-	22.8%	24%	26%	28%	30%	30%										
			143 Peningkatan Akses dan Kualitas PIK R/M																	
			10.3 Jumlah fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja	-	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov										
			144 Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Program Bina Ketahanan Remaja																	
11	Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan	Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan									3,881.8	12,428.4	3,418.5	5,640.0	5,817.0	6,107.9	33,411.7	PUSAT	DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN (DITHANLAN)	B Prioritas RKP (Pembangunan keluarga)
			I.11 Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia & Rentan	4.3%	4.3%	5.3%	8.0%	9.0%	10.0%	10.0%										
			11.1 Persentase Keluarga yang Memiliki Lansia Ikut BKL	-	8%	8%	8%	8%	8%	8%										
			151 Promosi Pembinaan dan Peningkatan Akses Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																	
			152 Peningkatan Jejaring Kemitraan																	
			11.2 Persentase PPKS yang Memberikan Pelayanan Komprehensif	-	30%	35%	40%	45%	50%	50%										
			153 Peningkatan Kualitas PPKS																	
			11.3 Jumlah fasilitasi pembinaan BKL dan PPKS yang berkualitas	-	34	34	34	34	34	34										
			154 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi BKL dan PPKS																	
12	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB									3,842.0	7,000.0	4,915.7	7,887.5	7,966.9	8,365.2	36,135.3	PUSAT	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA (DITPEMKON)	B Prioritas RKP (Pembangunan keluarga)
			I.12 Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	67.5%	68.5%	69.5%	70.5%	71.5%	72.5%	72.5%										
			12.1 Persentase keluarga pra sejahtera yang menjadi anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kejahtera (UPPKS)	51%	53.40%	53.90%	54.40%	54.90%	55.40%	55.40%										
			161 Pengembangan Kebijakan dan Peningkatan Promosi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																	
			162 Penguatan Kerjasama dengan Mitra Kerja dalam Pembinaan Kelompok UPPKS																	
			12.2 Persentase kelompok UPPKS yang mendapat bantuan permodalan	49.5	58.2	66.2	74.2	82.2	90.2	90.2										
			163 Pengembangan akses usaha ekonomi keluarga																	
			12.3 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang berkualitas	33	33	34	34	34	34	34										
			164 Pembinaan, Monitoring, dan evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																	
D	Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi	Meningkatnya Penghayatan Norma Keluarga Kecil									168,018.5	200,378.0	101,271.4	290,569.5	114,691.8	120,426.4	827,337.1	BKKBN	DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN, DAN INFORMASI (ADPIN)	
			D.1 Persentase wanita usia subur yang mengadopsi norma anak ideal	51.4%	-	51%	60%	65%	70%	70%										
			D.2 Persentase remaja yang yang mengadopsi norma Usia Kawin ideal	-	66%	68%	69%	71%	72%	72%										
			D.3 Persentase potensial demand	14.7%	-	14.7%	14.2%	13.7%	13.2%	13.2%										
			D.4 Presentase Pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan	-	-	10%	25%	45%	60%	60%										
13	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga	Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK									145,773.3	129,593.1	73,663.6	164,092.5	76,233.4	80,045.1	523,627.8	PUSAT	DIREKTORAT ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (DITVOKKOM)	N Prioritas RKP (Penguatan Advokasi dan KIE KB)
			I.13 Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK	80	82	84	86	88	90	90										
			13.1 Persentase stakeholders/pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang terpapar program KKBPK	80	82	84	86	88	90	90										
			171 Peningkatan Advoksi Program KKBPK melalui Media																	
			172 Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Mitra Kerja																	
			173 Peningkatan Advokasi Program KKBPK melalui Kegiatan Momentum																	
			II.13 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)	72	74	76	78	80	82	82										
			13.2 Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKPBK dari berbagai media	10,5 (Survei RPJMN 2014: %PUS yg mengetahui semua jenis alat/cara KB modern)	6,7 (Survei RPJMN 2015: %PUS yg mengetahui semua jenis alat/cara KB modern)	15	20	30	50	50										
			174 Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																	
			175 Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Lini Bawah																	
			176 Pengembangan Kebijakan dan Dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK																	
			III.13 Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	29,1	39,1	49,1	59,1	69,1	79,1	79,1										
			13.3 Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKBPK dari tenaga lini lapangan	29,1 (Survei RPJMN 2014)	39,1	49,1	59,1	69,1	79,1	79,1										
			177 Peningkatan promosi dan KIE Program KKBPK melalui Tenaga Lini Lapangan																	
			178 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
					2015	2016	2017	2018	2019			2015	PRAKIRAAN MAJU							
													2016	2017	2018	2019				
14	Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja	Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK									4,646.3	6,828.6	5,138.3	6,420.0	6,657.0	6,989.9	32,033.8	PUSAT	DIREKTORAT BINA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA (DITBINHUB)	B Prioritas RKP (Penguatan Advokasi dan KIE KB)
			I.14 Persentase kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah dalam implementasi program KKBPK	15%	30%	45%	60%	70%	80%	80%										
			14.1 Persentase mitra kerja melaksanakan program KKBPK	-	30%	45%	60%	70%	80%	80%										
			181 Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penggerakkan operasional program KKBPK																	
			182 Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional program KKBPK																	
			183 Pengembangan Kebijakan, Strategi dan Materi Informasi Bina Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan																	
			II.14 Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana prasarana, dan SDM)	40%dari 511 Kab/Kota	45%	55% dari 514 kab/kota	70%	80%	90%	90%										
			14.2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penguatan komitmen Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggerakkan operasional program KKBPK	-	-	-	34	34	34	34										
			184 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah																	
15	Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK									6,617.1	24,197.8	4,463.3	84,987.0	6,968.9	7,317.3	127,934.2	PUSAT	DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN (DITBINLAP)	N Prioritas RKP (Penguatan Advokasi dan KIE KB)
			I.15 Persentase Kab dan Kota yang mempunyai Jumlah PLKB/PKB sesuai ratio yg memadai (1:2 ideal)	25	30%	40%	50%	60%	70%	70%										
			Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten	2.650	806	882	882	882	882	4334										
			15.1 Persentase SDM Lini Lapangan yang terampil melaksanakan tupoksi	-	10%	40%	60%	80%	100%	100%										
			191 Pengembangan Kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja SDM Lini Lapangan dan Mekanisme Operasional																	
			192 Pengembangan Materi dan Sarana Prasarana Operasional Lini Lapangan																	
			193 Peningkatan Kapasitas SDM Lini Lapangan																	
			II.15 Persentase Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standarisasi kompetensinya	0 (8,675 PLKB/PKB D3/ S1/S2 pada tahun 2014)	-	10% dari jml PKB/PLKB	40% dari jml PKB/PLKB	70% dari jml PKB/PLKB	100% dari jml PKB/PLKB	100% dari jml PKB/PLKB										
			15.2 Persentase PKB/PLKB yang tersertifikasi	-	-	10%	40%	70%	100%	100%										
			194 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB																	
			III.15 Persentase pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Pembinaan program KKBPK di Lini lapangan	33 provinsi	100% jml provinsi	100% jml provinsi	100% jml provinsi	100% jml provinsi	100% jml provinsi	100% jml provinsi										
			15.3 Jumlah Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lini lapangan	34	34	34	34	34	34	34										
			195 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lini lapangan																	
16	Penyediaan data dan informasi program KKBPK	Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN									4,686.0	27,980.7	6,290.8	6,780.0	6,982.5	7,331.6	55,365.6	PUSAT	DIREKTORAT PELAPORAN DAN	N Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			I.16 Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi	6	11	17	17	17	17	17										
			Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK	26	26	26	26	26	26	130										
			16.1 Indeks kepuasan pemanfaatan data dan informasi KKBPK (oleh mitra kerja, masyarakat umum, internal BKKBN, Pemangku kepentingan)	1 dari skala 4	1 dari skala 4	2 dari skala 3	2 dari skala 4	3 dari skala 4	4 dari skala 4	4 dari skala 4										
			201 Pengembangan kebijakan Standarisasi Data dan Informasi Program KKBPK																	
			202 Data dan Informasi Statistik Rutin yang dimanfaatkan																	
			203 Peningkatan Kualitas data melalui Penguatan Sistem Pelaporan dan Statistik Rutin																	
			II.16 Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK	495 orang	591 orang	591 orang	591 orang	591 orang	591 orang	2955 orang										
			16.2 Jumlah Pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi yang berkualitas	6	12	19	19	19	19	12										
			204 Peningkatan kompetensi pengelola dalam pengelolaan data dan informasi																	
			205 Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi																	
17	Penyediaan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi program KKBPK	Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)									6,295.9	11,777.8	11,715.4	28,290.0	17,850.0	18,742.5	88,375.7	PUSAT	DIREKTORAT TEKNOLOGI, INFORMASI DAN DOKUMENTASI (DITTIFDOK)	B Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			I.17 Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK	3 dari skala 1-5	3 dari skala 1-5	3 dari skala 1-5	3,5 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5										
			17.1 Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK	-	3 dari skala 1-5	3 dari skala 1-5	3,5 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5										
			211 Pengembangan Sarana Prasarana Pengelolaan STIK																	
			212 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi dan Bank Data																	
			213 Penyebarluasan Layanan Informasi dan Dokumentasi Program KKBPK																	
			17.2 Persentase Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
			214 Peningkatan kompetensi pengelola																	
			215 Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
												2015	PRAKIRAAN MAJU							
					2015	2016	2017	2018	2019				2016	2017	2018	2019				
18	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	**Program KKBPK Provinsi**								**1,045,789.9**	**1,221,327.3**	**756,118.8**	**1,339,347.1**	**1,392,571.6**	**1,462,200.2**	**6,171,565.0**			
			Bidang DALDUK Provinsi								50,160.0	28,870.2	41,631.6	83,871.2	65,034.9	68,286.6	287,694.6	**Provinsi**	**Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDANG DALDUK PROV)**	**N** Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			I.18 Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	**33 Provinsi**	**33 provinsi (50% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (70% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (75% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)**										
			18.1 Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/paremeter dan Proyeksi Penduduk)	**-**	**-**	**-**	**75% Kab/Kota**	**85% Kab/Kota**	**100% Kab/Kota**	**100% Kab/Kota**										
			221 Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk																	
			222 Penetapan profil (parameter dan proyeksi) penduduk Tk. Kabupaten/Kota																	
			18.2 Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	**-**	**-**	**-**	**110 Kab/Kota**	**110 Kab/Kota**	**110 Kab/Kota**	**330 Kab/Kota**										
			223 Internalisasi Kebijakan Pengendalian dampak kependudukan di Kabupaten/ Kota																	
			18.3 Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	**-**	**-**	**-**	**34**	**34**	**34**	**34**										
			224 Implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)																	
			18.4 Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	**-**	**-**	**-**	**34**	**34**	**34**	**34**										
			225 Peningkatan kemitraan dalam perencanaan pengendalian penduduk																	
			226 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk																	
			Bidang KBKR Provinsi								463,726.6	228,397.6	254,554.2	439,870.0	412,549.7	433,177.2	1,768,548.7	**Provinsi**	**Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDANG KBKR PROV)**	**N** Prioritas RKP (Peningkatan Pelayanan KB)
			II.18 Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	**-**	**33 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)**	**34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)**										
			18.5 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	**-**	**-**	**PB MKJP = 618440; ganti cara (336.444), komplikasi berat (3.015), pencabutan implan dan kegagalan (563.637)**	**Additional Users (PA tambahan): 1.150.000**	**Additional Users (PA tambahan): 965.000**	**Additional Users (PA tambahan): 744.000**	**Additional Users (PA tambahan): 2.859.000**										
			230 Penggerakan dan pemantapan kesertaan ber-KB MKJP																	
			231 Pelayanan Pencabutan Implant																	
			18.6 Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	**-**	**2 frek/th/ kab**	**3 frek/th/ kab**	**3 frek/th/ kab**	**3 frek/th/ kab**	**3 frek/th/ kab**	**3 frek/th/ kab**										
			232 Peningkatan kualitas penggerakan pelayanan KBKR di di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus																	
			18.7 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	**-**	**29.4**	**43.3**	**57.2**	**71.1**	**85**	**85**										
			233 Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi																	
			18.8 Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	**-**	**8%**	**27%**	**47%**	**66%**	**85%**	**85%**										
			234 Peningkatan promosi Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota																	
			18.9 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	**-**	**100% Kab/Kota**	**100% Kab/Kota**	**100% Kab/Kota**	**100% Kab/Kota**	**100% Kab/Kota**	**100% Kab/Kota**										
			235 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi KBKR di Kabupaten dan Kota																	
			Bidang KSPK Provinsi								292,576.2	187,434.2	153,458.1	166,668.3	173,955.2	182,653.0	864,168.8	**Provinsi**	**Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDANG KSPK PROV)**	**N** Prioritas RKP (Pembangunan keluarga)
			III.18 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	**33 Prov dan 511 Kab/Kota**	**33 Prov dan 514 Kab/Kota**	**33 Prov dan 514 Kab/Kota**	**33 Prov dan 514 Kab/Kota**	**33 Prov dan 514 Kab/Kota**	**33 Prov dan 514 Kab/Kota**	**33 Prov dan 514 Kab/Kota**										
			18.10 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	**33 Prov dan 511 Kab/Kota**	**33 Prov dan 514 Kab/Kota**	**33 Prov dan 514 Kab/Kota**	**34 Prov dan 514 Kab/Kota**	**34 Prov dan 514 Kab/Kota**	**34 Prov dan 514 Kab/Kota**	**34 Prov dan 514 Kab/Kota**										
			240 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah																	
			18.11 Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										
			241 Fasilitasi Penguatan dan pembinaan BKB Holistic Integrative																	
			18.12 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										Prioritas RKP (Pembinaan Remaja)
			242 Pembinaan PIK R/M di Provinsi dan Kabupaten/Kota																	
			243 Pembinaan kelompok BKR																	
			18.13 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										
			244 Pengembangan dan pembinaan kelompok BKL																	
			18.14 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										
			245 Pembinaan kelompok UPPKS dan pembinaan PEK																	
			18.15 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	**33**	**33**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**										
			246 Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK di Kabupaten dan Kota																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
					2015	2016	2017	2018	2019			2015	PRAKIRAAN MAJU							
													2016	2017	2018	2019				
			Bidang ADPIN Provinsi								239,327.0	776,625.3	306,474.9	648,937.6	741,031.7	778,083.3	3,251,152.8	**Provinsi**		**N**
			IV.18 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	**0%**	**30%**	**45%**	**60%**	**70%**	**80%**	**80%**										Prioritas RKP (Penguatan Advokasi dan KIE KB)
			18.16 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	**33**	**33**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**										
			250 Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKB																	
			18.17 Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional																	
			251 Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional																	
			252 Pelaksanaan Advokasi dan KIE program KKBPK melalui mupen																	
			V.18 Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan Operasional program KKBPK	**100% dari 22.481 PLKB/PKB**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**								**Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDANG ADPIN PROV)**	Prioritas RKP (Peningkatan Pelayanan KB)
			18.18 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah	**-**	**-**	**-**	**34**	**34**	**34**	**34**										
			253 Dukungan Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan wilayah																	
			18.19 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	**-**	**-**	**-**	**34**	**34**	**34**	**34**										
			254 Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat																	
			255 Monitoring dan Evaluasi penggerakan mekanisme operasional dan implementasi kegiatan Bidang ADPIN di Lini Lapangan																	
			VI.18 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	**33 prov dan 497 kab/kota**	**33 prov dan 511 kab/kota**	**34 prov dan 514 kab/kota**	**34 prov dan 514 kab/kota**	**34 prov dan 514 kab/kota**	**34 prov dan 514 kab/kota**	**34 prov dan 514 kab/kota**									Prioritas RKP (Penguatan Advokasi dan KIE KB)
			18.20 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										
			256 Peningkatan kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK																	
			VII.18 Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	**2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)**	**2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)**	**2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)**	**2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)**	**2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)**	**2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)**	**2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)**									Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			18.21 Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	**33**	**-**	**-**	**34**	**34**	**34**	**34**										
			257 Peningkatan pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi																	
			258 Pengembangan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan sistem informasi kependudukan dan keluarga																	
II	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN**	**Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK**									**566,318.8**	**636,340.6**	**635,474.7**	**768,753.3**	**2,907,190.9**	**3,052,550.5**	**8,000,310.0**	**BKKBN**	**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)**	
			1 Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	**4**	**4**	**1**	**1**	**1**	**1**	**8**										
			2 Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**	**WTP**										
			3 Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	**5**	**5**										
			4 Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	**50% pengembangan SDM**	**52% pengembangan SDM**	**55% pengembangan SDM**	**57% pengembangan SDM**	**60% pengembangan SDM**	**63% pengembangan SDM**	**63% pengembangan SDM**										
			5 Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	**-**	**3 dari skala 1-4**	**3 dari skala 1-4**	**3 dari skala 1-4**	**4 dari skala 1-4**	**4 dari skala 1-4**	**4 dari skala 1-4**										
			6 Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	**33 prov**	**33 prov**	**34 prov**	**34 prov**	**34 prov**	**34 prov**	**34 prov**										
E	**Sekretariat Utama**	**Terwujudnya dukungan manajemen dalam penyelenggaraan program KKBPK**									**130,094.6**	**184,479.6**	**158,975.2**	**196,664.0**	**185,229.4**	**194,490.9**	**919,839.2**	**BKKBN**	**SEKRETARIAT UTAMA (SESTAMA)**	
			E.1 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya	**PP87/2014 tentang perkembangan kependudukan, PK , KB dan Sistem informasi keluarga)**	**Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga**	**Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga**	**Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program**	**Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program**	**Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program**	**Perpres tentang pedoman pelaksanaan Pembangunan Pengendalian Penduduk dan KB serta peraturan perundangan terkait Program KKBPK**										
			E.2 Persentase unit kerja yang melakukan tata kelola keuangan dan BMN yang memenuhi standar kepatutan	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										
			E.3 Persentase unit kerja BKKBN yang melakukan perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan nasional	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										
			E.4 Persentase pemetaan ASN BKKBN yang sesuai dengan standar kompetensi	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										
			E.5 Persentase pelayanan kerumahtanggan & protokol, administrasi umum dan pengelolaan sarana & prasarana yang sesuai dengan standar	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**										

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
					2015	2016	2017	2018	2019			2015	PRAKIRAAN MAJU							
													2016	2017	2018	2019				
19	Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK									5,332.6	8,500.0	5,603.6	7,700.0	8,085.0	8,489.3	38,377.8	PUSAT	BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS (BIHOM)	N
			I.19 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota	4	4	1	1	1	1	8										Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			19.1 Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK	4	4	1	10	10	5	25										
			301 Penyediaan regulasi/kebijakan dan materi hukum, organisasi dan humas																	
			19.2 Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum,Organisasi dan Humas	33	33	34	34	34	34	34										
			302 Pembinaan dan fasilitasi kehumasan BKKBN																	
			303 Pembinaan dan fasilitasi kasus hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku																	
			304 Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB di daerah																	
20	Pengelolaan Keuangan dan BMN	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP									8,036.8	27,300.0	9,373.1	11,875.7	9,082.5	9,536.6	67,168.0	PUSAT	BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN BMN (BIKUB)	KL
			I.20 Persentase Laporan Keuangan & BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
			20.1 Jumlah satker yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan peraturan perundang undangan	-	-	-	42	42	42	42										
			311 Implementasi Pengelolaan Keuangan Sesuai Sistem Akuntansi Instansi																	
			20.2 Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %										
			312 Pengelolaan Administrasi Keuangan																	
			20.3 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundangan	-	-	-	100%	100%	100%	100%										
			313 Peningkatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP																	
			20.4 Persentase Barang Inventaris Tercatat pada SIMAK BMN di semua tingkatan yang kredibel	-	-	-	100%	100%	100%	100%										
			314 Pengelolaan BMN																	
			315 Implementasi Pengelolaan Barang Persediaan																	
			20.5 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan BMN yang dilaksanakan	42 Satuan kerja	42 Satuan kerja	42 Satuan kerja	42 Satuan kerja	42 Satuan kerja	42 Satuan kerja	42 Satuan kerja										
			316 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan BMN																	
21	Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja									9,089.3	9,022.4	6,931.9	9,600.0	9,082.5	9,536.6	44,173.5	PUSAT	BIRO PERENCANAAN (BIREN)	KL
			I.21 Jumlah Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	4	3	3	3	3	4	4										
			21.1 Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang merencanakan program dan anggaran yang berkualitas	-	-	-	62	62	62	62										
			321 Penyediaan kebijakan perencanaan program dan anggaran yang berkualitas yang dapat diimplementasikan																	
			322 Penyediaan data basis perencanaan yang tersedia tepat waktu, lengkap, akurat berbasis Teknologi Informasi																	
			323 Penetapan sasaran KB (PPM PA/PB) dan KS																	
			324 Penyediaan perencanaan program yang berkualitas *(mengacu pada pendekatan money follow program dan pendekatan holistik, terintegrasi, tematik dan spasial)*																	
			325 Peningkatan koordinasi kerjasama Luar Negeri dalam mendukung KKBPK																	
			326 Pengembangan Peta strategi BKKBN dan eselon I dan score card eselon II, III dan IV																	
			21.2 Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang melaksanakan program dan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan	-	-	-	62	62	62	62										
			327 Monitoring dan Pembinaan Perencanaan Program dan Anggaran program KKBPK																	
			328 Evaluasi perencanaan program dan anggaran																	
22	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten									5,213.6	8,054.3	5,492.3	7,160.0	7,360.5	7,728.5	35,795.6	PUSAT	BIRO KEPEGAWAIAN (BIPEG)	KL
			I.22 Persentase Pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara yang Optimal	100	100	100	100	100	100	100										
			22.1 Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian	-	-	3 (skala 1-5)	3 (skala 1-5)	3 (skala 1-5)	4 (skala 1-5)	4 (skala 1-5)										
			331 Penyediaan dokumen perencanaan pegawai yang berkualitas																	
			332 Penyediaan standar kompetensi jabatan dan profil kekuatan ASN BKKBN																	
			333 Pelaksanaan manajemen ASN dalam menjamin sistem merit																	
			334 Pengembangan budaya kerja Organisasi dan Pembinaan disiplin pegawai																	
			II.22 Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien	50	60	70	80	90	100	100										
			22.2 Jumlah fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	34 (1pusat, 33 prov)	34 (1pusat, 33 prov)	34 (1pusat, 33 prov)	34 (1pusat, 33 prov)	34 (1pusat, 33 prov)										
			335 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang akurat dan tepat waktu																	
			336 Penyediaan data ASN BKKBN yang akurat dan terkini melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) BKKBN																	
			337 Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Motivasi ASN																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
												2015	PRAKIRAAN MAJU							
					2015	2016	2017	2018	2019				2016	2017	2018	2019				
23	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang cepat dan tepat	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran									102,422.2	131,602.9	131,574.3	160,328.3	151,618.9	159,199.9	734,324.3	PUSAT	BIRO UMUM (BIRUM)	KL
			I.23 Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan	-	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)										
			23.1 Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumah tanggaan	-	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)										
			001 Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja																	
			341 Peningkatan kualitas pelayanan kerumah tanggaan																	
			II.23 Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	-	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)										
			23.2 Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	-	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)										
			002 Peningkatan Cakupan penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran																	
			342 Pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran (output 951)																	
			III.23 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keprotokolan dan Keamanan	-	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)										
			23.3 Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, keprotokolan dan keamanan	-	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 3 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)										
			343 Pengembangan Perangkata tatalaksana administrasi umum																	
			344 Peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan																	
			345 Peningkatan kualitas Pelayanan keamanan kantor																	
			346 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum																	
			23.4 Jumlah fasilitasi, pembinaan dan evaluasi	-	-	-	12	12	12	12										
			347 Peningkatan pembinaan program serta monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi umum yang berkualitas																	
24	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi	Program DKM Provinsi								436,224.2	451,861.0	476,499.5	572,089.2	2,721,961.5	2,858,059.6	7,080,470.8			
			Sekretariat Provinsi								436,224.2	451,861.0	476,499.5	572,089.2	2,721,961.5	2,858,059.6	7,080,470.8	Provinsi	Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDANG SEKRETARIAT PROV)	KL
			I.24 Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan untuk 33 Prov	13 bulan untuk 33 Prov	13 bulan untuk 34 Prov	13 bulan untuk 34 Prov	13 bulan untuk 34 Prov	13 bulan untuk 34 Prov	13 bulan untuk 34 Prov										
			24.1 Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100	100	100	100	100	100	100										
			001 Pelaksanaan Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi																	
			24.2 Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	12	12	12	12	12										
			002 Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan perkantoran																	
			24.3 Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12	12	12	12	12	12	12										Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			351 Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran program KKBPK																	
			352 Peningkatan kualitas kompentensi pegawai																	
			353 Pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan																	
			354 Peningkatan pelaksanaan NSPK dan pengelolaan organisasi dan tatalaksana																	
			355 Penyediaan Sarana dan prasarana perkantoran																	
			356 Peningkatan kualitas pelaksanaan program KKBPK provinsi (MONEV)																	
III	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK									5,369.9	11,629.0	12,438.6	17,600.0	18,480.0	19,404.0	79,551.6	BKKBN	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	
			1 Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	25 % (dari 14 satker yang di audit eksternal)	20 % (dari satker yang diaudit eksternal)	15 % (dari satker yang diaudit eksternal)	10 % (dari satker yang diaudit eksternal)	5 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)										
			2 Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi	33 Prov	33 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov										
F	Inspektorat Utama	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran									5,369.9	9,000.0	9,598.0	13,600.0	14,280.0	14,994.0	61,472.0	BKKBN	INSPEKTORAT UTAMA (IRTAMA)	
			F.1 Persentase penurunan temuan eksternal	-	75%	60%	55%	50%	45%	45%										
			F.2 Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	-	75%	80%	85%	90%	95%	95%										
			F.3 Persentase Satuan Kerja Mewujudkan Pembangunan Zona Intergritas Wilayah	-	75%	80%	85%	90%	95%	95%										
25	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah I	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I									1,947.0	3,200.0	3,391.9	4,433.5	4,655.2	4,887.9	20,568.5	PUSAT	INSPEKTORAT WILAYAH I (ITWIL I)	KL
			I.25 Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker										
			25.1 Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan I		75%	60%	55%	50%	45%	45%										
			361 Kebijakan dan Strategi Pengawasan program KKBPK																	
			362 Pelaksanaan Pengawasan Intern Program KKBPK Wilayah Pengawasan I																	
			25.2 Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		75%	80%	85%	90%	95%	95%										
			363 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP																	
			25.3 Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi		75%	80%	85%	90%	95%	95%										
			364 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih																	
			25.4 Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I		14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok										
			365 Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA 2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH) 2015	PRAKIRAAN MAJU 2016	2017	2018	2019	TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
26	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah II	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II									1,997.5	2,900.0	2,613.9	4,433.5	4,655.2	4,887.9	19,490.5	PUSAT	INSPEKTORAT WILAYAH II (ITWIL II)	KL
			I.26 Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker										
			26.1 Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan II		75%	60%	55%	50%	45%	45%										
			371 Kebijakan dan Strategi Pengawasan program KKBPK																	
			372 Pelaksanaan Pengawasan Intern Program KKBPK Wilayah Pengawasan II																	
			26.2 Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		75%	80%	85%	90%	95%	95%										
			373 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP																	
			26.3 Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi		75%	80%	85%	90%	95%	95%										
			374 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih																	
			26.4 Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II		14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok										
			375 Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II																	
27	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK wilayah III	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III									1,425.4	2,900.0	3,592.2	4,733.0	4,969.7	5,218.1	21,413.0	PUSAT	INSPEKTORAT WILAYAH III (ITWIL III)	KL
			I.27 Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker	14 Satker										
			27.1 Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan III		75%	60%	55%	50%	45%	45%										
			381 Kebijakan dan Strategi Pengawasan program KKBPK																	
			382 Pelaksanaan Pengawasan Intern Program KKBPK Wilayah Pengawasan III																	
			27.2 Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		75%	80%	85%	90%	95%	95%										
			383 Peningkatan efektifitas penyelenggaraan SPIP																	
			27.3 Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi		75%	80%	85%	90%	95%	95%										
			384 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih																	
			27.4 Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III		14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok	14 dok										
			385 Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III																	
28	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	Program Akuntabilitas pengelolaan (pengawasan) Provinsi								-	2,629.0	2,840.6	4,000.0	4,200.0	4,410.0	18,079.6			
			Pengawasan Provinsi								-	2,629.0	2,840.6	4,000.0	4,200.0	4,410.0	18,079.6	Provinsi	Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDANG PENGAWASAN PROV)	KL
			I.28 Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	33	33	34	34	34	34	34										
			28.1 Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	33	33	34	34	34	34	34										
			390 Peningkatan fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi																	
IV	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK									204,115.1	265,188.4	187,399.8	296,011.1	310,811.7	326,352.2	1,385,763.2	BKKBN	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	
			1 Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	50% SDM Aparatur	60% SDM Aparatur	70% SDM Aparatur	80% SDM Aparatur	90% SDM Aparatur	100% SDM Aparatur	100% SDM Aparatur										
			2 Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	1	1	1	1	1	1	5										
			3 Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK		1	2	2	3	3	11										
			4 Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan		3 (dari skala 1-4)	3,1 (dari skala 1-4)	3,2 (dari skala 1-4)	3,3 (dari skala 1-4)	3,4 (dari skala 1-4)	3,4 (dari skala 1-4)										
			5 Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	33 prov	33 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov	34 prov										
G	Bidang Pelatihan, penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya kualitas pelatihan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk penentu kebijakan									31,787.2	54,431.2	62,014.1	126,626.0	135,267.3	142,030.7	520,369.3	BKKBN	DEPUTI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LATBANG)	
			G.1 Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijakan program KKBPK	-	77	77	80	83	87	87										
			G2 Persentase tenaga program nasional yang terlatih	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%										
			G.3 Jumlah negara pengirim peserta program pelatihan internasional	12	16	18	19	20	21	21										
			G.4 Persentase pegawai yang telah terpenuhi haknya mengikuti pelatihan kompetensi	55%	61%	61%	61%	62%	62%	62%										
			G.5 Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang Terakreditasi	0	1	1	1	1	1	5										
29	Peningkatan pendidikan dan pelatihan Bidang Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB									12,957.0	28,659.0	23,512.8	17,552.2	25,359.9	26,627.8	121,711.8	PUSAT	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KKBPK (PULAP)	KL
			I.29 Persentase SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program Meningkat Kualitasnya	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%										
			29.1 Persentase SDM Tenaga Pegawai dan Tenaga Program yang mengikuti pelatihan	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%										
			401 Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan																	
			402 Pendidikan Jangka Panjang (Bantuan Tugas belajar S1 UT, Beasiswa S2 dan S3)																	
			403 Diklat Fungsional																	
			404 Diklat Teknis																	
			29.2 Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang terfasilitasi untuk akreditasi	-	1	1	1	1	1	5										
			405 Standarisasi Balatbang dan UPT Balai Diklat																	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019	BASELINE ALOKASI 2014	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					TOTAL ALOKASI 2015 s.d 2019	LOKASI	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA	PRIORITAS (N/B/KL)
					2015	2016	2017	2018	2019			2015	PRAKIRAAN MAJU 2016	2017	2018	2019				
			406 Kebijakan Diklat dan Strategi Diklat (Pedoman, Kurikulum, Modul/Materi dan Media Pembelajaran)																	
			407 Pelaksanaan *Assessment* dalam rangka Akreditasi Diklat																	
			408 Jejaring Kemitraan dan Kerjasama dalam Kediklatan																	
			409 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan																	
30	Pengembangan Pelatihan dan Kerjasama Internasional bidang Kependudukan dan KB	Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional									5,882.5	8,313.7	16,539.4	15,500.0	14,700.0	15,435.0	70,488.1	PUSAT	PUSAT PELATIHAN DAN KERJASAMA INTERNASIONAL KKBPK (PULIN)	KL
			I.30 Jumlah SDM Aparatur yang Meningkat Kualitasnya Melalui Program Pendidikan ke Luar Negeri	40	40	40	40	40	40	200										
			30.1 Jumlah SDM Aparatur dan Mitra Kerja yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri	40	46	48	48	55	61	258										
			411 Peningkatan SDM Aparatur/ Mitra kerja melalui Pendidikan S2 dan S3 Luar Negeri																	
			412 Jumlah Pejabat/Staf/Mitra Kerja yang Mengikuti Kegiatan Short Training and Courses Luar Negeri																	
			413 Jumlah Pejabat/Staf/Mitra Kerja yang Menjadi Pembicara /Delegasi pada Pertemuan Internasional Luar Negeri																	
			30.2 Jumlah Kerjasama Internasional yang dapat Diimplementasikan	3	2	4	5	6	6	23										
			414 Pengembangan MoU yang Disepakati dalam Bentuk Kegiatan																	
			415 Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Internasional bagi Peserta Luar Negeri di Indonesia																	
			416 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Internasional																	
31	Peningkatan Penelitian dan pengembangan KB dan KS	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS									7,075.4	8,482.5	12,187.3	14,387.0	12,428.9	13,050.3	60,535.9	PUSAT	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KB DAN KS (PUSNA)	KL
			I.31 Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12	14	15	16	17	18	18										Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			31.1 Tingkat kepuasan pengguna (user) terhadap hasil penelitian KB dan KS	-	-	3,0 (skala 1-4)	3,1 (skala 1-4)	3,2 (skala 1-4)	3,3 (skala 1-4)	3,3 (skala 1-4)										
			421 Penelitian dan pengembangan KB dan KS																	
			422 Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil litbang KB dan KS																	
			423 Peningkatan kerja sama dengan mitra dan jejaring yang aktif melakukan kerjasama litbang KB dan KS																	
			31.2 Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan KB dan KS	-	34	34	34	34	34	34										
			424 Pengembangan SDM litbang KB dan KS																	
			425 Monitoring dan Evaluasi penelitian dan pengembangan KB dan KS																	
32	Peningkatan penelitian dan pengembangan Kependudukan	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan									5,872.3	8,976.0	9,774.6	79,186.8	82,778.6	86,917.5	267,633.5	PUSAT	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPENDUDUKAN (PUSDU)	B
			I.32 Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	14	16	15	14	16	17	17										Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			32.1 Tingkat Kepuasan Pengguna (user) terhadap Hasil Penelitian (Indeks)	3 (skala 1-4)	3 (skala 1-4)	3,1 (skala 1-4)	3,2 (skala 1-4)	3,3 (skala 1-4)	3,5 (skala 1-4)	3,5 (skala 1-4)										
			431 Penelitian dan Pengembangan Kependudukan																	
			432 Penyebarluasan (Penyajian/Publikasi) dan Pemanfaatan Hasil Litbang Kependudukan																	
			433 Pelaksanaan Program dan Kerjasama dengan Mitra dan Jejaring Litbang Kependudukan																	
			434 Monitoring, Evaluasi dan fasilitasi Penelitian dan pengembangan																	
33	Pelaksanaan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Provinsi								**172,327.9**	**210,757.2**	**125,385.7**	**169,385.1**	**175,544.4**	**184,321.6**	**865,393.9**			
			Latbang Provinsi								141,642.6	190,838.6	81,648.0	120,091.5	123,786.1	129,975.4	646,339.5	Provinsi	Perwakilan BKKBN Provinsi (BIDANG LATBANG PROV)	KL
			I.33 Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh										
			33.1 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	10997	11996	12996	13996	14996	15995	15995										
			441 Pembinaan dan Pengembangan SDM provinsi																	
			Litbang Provinsi								30,685.3	19,918.6	43,737.8	49,293.6	51,758.3	54,346.2	219,054.5			
			II.34 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov											B
			33.2 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan		3	3	3	3	3	15										Prioritas RKP (Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi)
			451 Penelitian dan pengembangan Program KKBPK																	

Lampiran II:

Matriks Kerangka Regulasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

NO	ARAH KERANGKA DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Amandemen UU 52 Tahun 2009	Perubahan amandemen ini terkait dengan pengaturan kelembagaan BKKBN sebagaimana diatur dalam BAB IX. Perubahan ini berfokus pada ketepatan ukuran organisasi (right sizing) dan tumpang tindih (overlapping) tugas dan fungsi serta perubahan kewenangan pada BKKBN.	BKKBN (Para Eselon I)	Kemenkes, Setneg, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenpan, BKN, Kemendagri	Tahun 2015-2019
2	Perpres turunan PP 87/2014	Penyusunan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dimaksudkan sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari PP 87/2014, adapun materi muatan yang diatur, meliputi: a. Perpres tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga b. Perka tentang Kelembagaan BKKBN c. Perka tentang Kelembagaan BKKBN Provinsi d. Perka tentang Kelembagaan Diklat e. Perka tentang KB f. Perka tentang Penelitian dan Pengembangan g. Perka tentang SDM Penelitian h. Perka tentang Sistem Informasi Keluarga	BKKBN (Kedeputian Dalduk dan Kedeputian KSPK)	Kemenkes, Setkab, Kemenkumham	Tahun 2015-2019
3	Perpres Kelembagaan (Perubahan Perpres no 3 dan no 4 /2013)	Perubahan ini berfokus pada ketepatan ukuran organisasi (right sizing) dan tumpang tindih (overlapping) tugas dan fungsi serta perubahan kewenangan pada BKKBN. Perundang-undangan terkait : - UU 23 tahun 2014 (Urusan Pengendalian Penduduk dan KB) - PP 87/2014 - Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 - Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 - Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang telah diubah dengan perka 273/PER/B4/2014.	BKKBN (Sestama)	Kemenkes, Setkab, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenpan, BKN, Kemendagri	Tahun 2015
4	Perpres Tentang Tunjangan Kinerja	Dalam rangka Pelaksanaan Reformasi birokrasi di BKKBN dan untuk meningkatkan kinerja pegawai perlu mengatur dan meninjau kembali tunjangan kinerja pegawai BKKBN.	BKKBN (Sestama)	Kemenkes, Setkab, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenpan, BKN, Kemendagri	Tahun 2015-2016
5	Perka Tentang Pengelolaan dan Pendayagunaan PKB/PLKB	Penyusunan regulasi terkait dengan pembagian urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 Lampiran I huruf N. Penyusunan regulasi ini sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan efisien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan.	BKKBN (Sestama dan kedeputian Adpin)		Tahun 2015-2019
6	Perka tentang hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB				
7	Perka tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB di Daerah Provinsi dan Kab/Kota				
8	Perka tentang Renstra (revisi)		BKKBN (Sestama)		
9	Perka tentang NSPK sesuai Sub Urusan Pengendalian Penduduk dan KB		BKKBN		
10	Perpres Tentang Pengelolaan dan Penyediaan Alokon		BKKBN (Sestama dan kedeputian KBKR)		
11	Perka tentang Standarisasi Pelayanan KB				
12	Perpres Tentang Sertifikasi PKB		BKKBN (Sestama, Kedeputian Latbang dan kedeputian Adpin)		
13	Perka Tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Ormas dalam Program pengendalian Penduduk dan KB		BKKBN (Sestama, kedeputian Adpin dan Kedeputian KSPK)		